

ANALISIS KARAKTERISTIK PELAKU GRATIFIKASI DI KOTA TANJUNGPINANG

Oleh
Shifra Sylvania Anandya
NIM. 2205040051

Abstrak

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling sulit dideteksi karena kerap bersinggungan dengan kebiasaan sosial masyarakat, khususnya di daerah dengan akar budaya yang kuat seperti Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik pelaku gratifikasi serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaku melakukan gratifikasi di Kota Tanjungpinang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap tiga informan kunci, yaitu Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, dilengkapi analisis dokumen hukum, dan dianalisis menggunakan Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku gratifikasi memiliki tiga karakteristik utama yang saling berkaitan, yaitu penguasaan jabatan dan kewenangan strategis khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara dan perizinan pola perilaku yang terencana dalam mendekati pihak yang dapat memberikan keuntungan atau perlindungan, serta pemanfaatan lingkungan sosial-budaya Melayu yang permisif sehingga maksud gratifikasi mudah disamarkan sebagai kebiasaan budaya. Faktor yang memengaruhi pelaku bersifat berlapis, meliputi faktor internal (niat, sifat, dan lemahnya integritas), faktor eksternal yang lebih dominan (penyalahgunaan jabatan, kepentingan pribadi dan kelompok, serta tekanan masalah hukum), faktor sosial-budaya (budaya “tidak enak”, utang budi, dan balas jasa), serta faktor institusional berupa lemahnya pelaporan (*underreporting*), sementara faktor ekonomi bukan penyebab dominan. Ditinjau dari Teori Asosiasi Diferensial, gratifikasi merupakan perilaku yang dipelajari dan diperkuat melalui interaksi sosial dalam lingkungan jabatan dan budaya yang permisif, bukan perilaku bawaan pelaku. Dengan demikian, pencegahan gratifikasi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi harus disertai transformasi budaya hukum dan penguatan sistem pelaporan.

Kata Kunci: gratifikasi, karakteristik pelaku, korupsi, Kota Tanjungpinang

ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF GRATIFICATION PERPETRATORS IN TANJUNGPINANG CITY

By
Shifra Sylvania Anandya
NIM. 2205040051

Abstract

Gratification is one of the most difficult forms of corruption to detect because it often overlaps with prevailing social customs, particularly in regions with strong cultural roots such as Tanjungpinang City. This study aims to analyze the characteristics of gratification offenders and the factors that influence offenders in committing gratification in Tanjungpinang City. It employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews with three key informants, namely the Tanjungpinang District Prosecutor's Office, the Tanjungpinang City Regional Inspectorate, and the Riau Islands Malay Customary Institution, complemented by legal document analysis and examined through Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory. The results show that gratification offenders share three interrelated characteristics: control over strategic positions and authority especially in state financial management and licensing planned behavior in approaching parties who can provide benefits or protection, and the exploitation of a permissive Malay socio-cultural environment that allows the intent of gratification to be disguised as cultural custom. The influencing factors are layered, comprising internal factors (intent, character, and weak integrity), more dominant external factors (abuse of office, personal and group interests, and legal pressure), socio-cultural factors (the culture of “tidak enak/reluctance to refuse”, indebtedness, and reciprocity), and institutional factors in the form of weak reporting (underreporting), while economic factors are not the dominant cause. Viewed through Differential Association Theory, gratification is a behavior that is learned and reinforced through social interaction within a permissive occupational and cultural environment, rather than an inherent trait of the offender. Accordingly, preventing gratification cannot rely on a repressive approach alone, but must be accompanied by a transformation of legal culture and the strengthening of the reporting system.

Keywords: gratification, offender characteristics, corruption, Tanjungpinang City